

Judul : Hak Masyarakat Miskin Jangan Sampai Hilang
Tanggal : Minggu, 24 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Iuran BPJS Naik Bertahap

Hak Masyarakat Miskin Jangan Sampai Hilang

Senayan mengingatkan agar wacana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap mulai 2026, tidak mengurangi hak masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya karena hitung-hitungan fiskal.

ANGGOTA Komisi IX DPR Nurhadi menyebut, Pemerintah memang tidak menaikkan tarif iuran secara serentak. Kenaikan akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi fiskal negara.

Namun dia mengingatkan, kebijakan tersebut bisa berdampak pada keberlanjutan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Pasalnya, kesehatan adalah hak dasar warga negara, bukan komoditas.

"Karena itu, kebijakan pembiayaan tidak boleh sampai menutup akses masyarakat terhadap JKN," ujar politikus Partai Nas-Dem itu dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Dia menegaskan, bila iuran benar-benar dinaikkan, maka subsidi justru harus diperkuat. Prinsip keadilan fiskal adalah menuntut keberpihakan negara kepada yang lemah.

"Jika wacana tersebut jadi diterapkan, jangan sampai berdampak terhadap subsidi bagi

masyarakat," tegas legislator asal Dapil Jawa Timur VI itu.

Selain soal subsidi, Nurhadi juga meminta agar peningkatan iuran dibarengi dengan perbaikan layanan. Pemerintah harus bisa memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejalan dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik jika diwajibkan membayar lebih mahal.

"Jangan sampai rakyat dipaksa membayar lebih mahal untuk layanan yang justru semakin rumit dan mengecewakan," katanya.

Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati menambahkan, rencana kenaikan iuran sudah lama dipertimbangkan. Ini solusi menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjadi harapan jutaan rakyat Indonesia.

Kurniasih bilang, pasca pandemi Covid-19, kondisi keuangan BPJS semakin tertekan akibat meningkatnya pengeluaran. Di



Nurhadi

saat yang sama, jumlah peserta terutama penerima bantuan iuran (PBI) terus bertambah.

"Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan penting untuk menjaga keberlanjutan JKN. Tapi, jangan sampai menjadi beban tambahan bagi masyarakat," imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Kurniasih mengingatkan, kondisi sosial ekonomi bangsa belum pulih. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, sedangkan daya beli masyarakat terus melemah. Makanya, perlu diperhatikan dengan cermat waktu dan besaran kenaikannya.

"Jangan sampai masyarakat justru menanggung iuran dan kon-

sumsi rumah tangga ikut tertekan, yang akhirnya berdampak pada perekonomian nasional," katanya.

Kurniasih juga menegaskan, rencana kenaikan iuran harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. Banyak keluhan masyarakat perihal pelayanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan. Mulai dari diskriminasi pasien, sulitnya proses rujukan, keterbatasan ruang rawat inap, hingga implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang belum konsisten.

Menurutnya, publik akan lebih menerima penyesuaian iuran jika Pemerintah dan BPJS terlebih dulu membuktikan adanya peningkatan layanan serta memberikan kemudahan peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini ada.

"Buktikan dulu peningkatan pelayanan, baru bicara penyesuaian iuran," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan di balik rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada tahun depan. Kenaikan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan Program JKN dan

menambah peserta PBI.

Sri menjelaskan, keberlanjutan dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung pada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. "Kalau manfaatnya makin banyak biayanya semakin besar," ujar Sri dalam Rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat tarif BPJS dinaikkan, Pemerintah menanggung selisih iuran untuk peserta mandiri.

"Iuran mandiri tetap Rp 35 ribu, padahal seharusnya Rp 42 ribu, sehingga selisih Rp 7 ribu itu dibayar Pemerintah, terutama untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU)," beber eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menkeu belum mau mengungkapkan besaran kenaikan iuran BPJS yang akan dilakukan pada tahun depan. Pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian iuran masih akan dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. ■ P.YB